

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang guna membenahi dan mempertahankan kehidupan mereka tanpa adanya perbedaan. Capaian dari seluruh sektor pembangunan wajib dinikmati secara merata oleh seluruh golongan gender yang selaras dengan keperluan mereka. Akan tetapi masih rendahnya integrasi gender pada proses pembangunan menimbulkan kesenjangan gender diberagam bidang. Relasi atau keadaan laki-laki serta perempuan yang timpang ini lazimnya dinamakan isu gender. Guna usaha supaya pembangunan bisa merespon perbedaan keperluan laki-laki serta perempuan, maka isu gender wajib terintegrasikan pada program pembangunan selaras dengan tugas pokok serta fungsi.

Pada dasarnya terdapat dua langkah intervensi untuk mengurangi kesenjangan gender yaitu pengembangan kebijakan yang spesifik gender dan perencanaan penganggaran yang responsif gender dengan melaksanakan penyelarasan pada kebijakan yang sudah ada. Langkah yang dapat diambil mencakup dengan melaksanakan pengarusutamaan gender lewat perumusan kebijakan yang sudah ada harus berperspektif gender serta melaksanakan sosialisasi kesetaraan serta keadilan gender mencakup isu yang butuh difokuskan beserta keahlian teknik analisis gender pada para perencana maupun pelaksana pembangunan sehingga menghasilkan program pembangunan yang responsif gender (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerja sama dengan *Women's Support Project II*, 2001:3)

Dalam rangka meningkatkan kesetaraan serta keadilan gender pemerintah Indonesia telah berkomitmen guna melakukan kebijakan pengarusutamaan gender melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 memberitahukan pada semua Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur serta

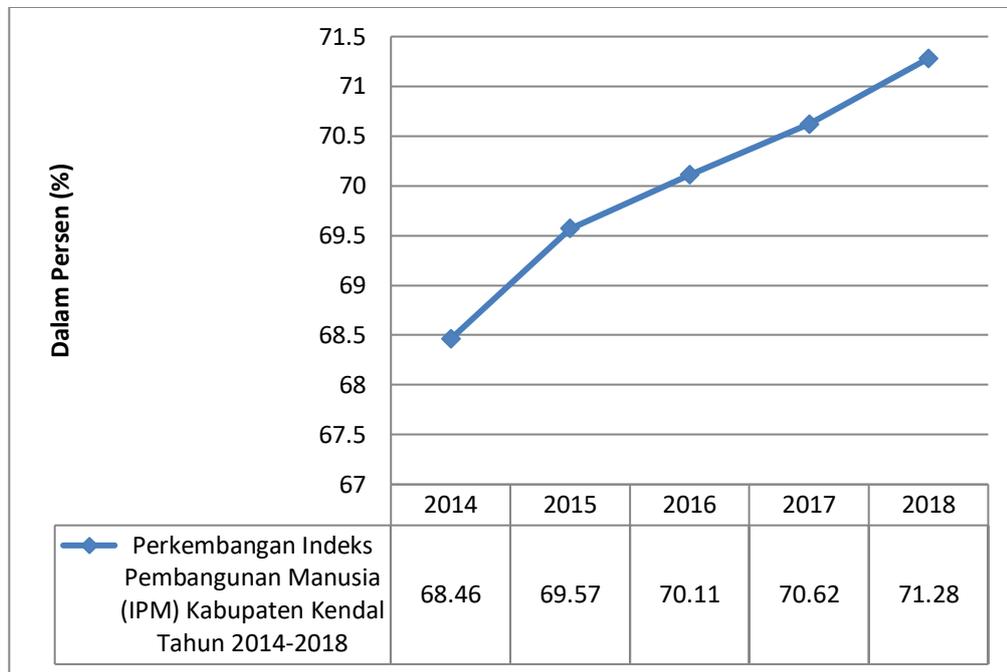
Bupati atau Walikota guna mengintegrasikan PUG (Pengarutamaan Gender) di tiap tahap proses pembangunan, dimulai dari perencanaan serta penganggaran, penyelenggaraan, monitoring, serta evaluasi semua ketetapan, program serta kegiatan nasional, provinsi, serta kabupaten atau kota diseluruh sektor pembangunan. Guna mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan serta penganggaran, ditahun 2003 dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 132 tahun 2003 mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 132 tahun 2003 dicabut ditahun 2008 lewat Permendagri No 15 tahun 2008 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Permendagri itu lalu diubah dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2011 mengenai perubahan atas Permendagri No 15 tahun 2008 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Permendagri no 15 tahun 2008 jo Permendagri no 67 tahun 2011 di Pasal 4 Permendagri No 67 Tahun 2011 menjabarkan: 1. Pemerintah daerah berkewajiban membuat kebijakan, program, serta aktivitas pembangunan responsif gender yang dijabarkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ataupun RPJMD, Rencana Strategis SKPD, serta Rencana Kerja SKPD; 2. Pembuatan kebijakan, program, serta aktivitas pembangunan responsif gender sesuai di ayat (1) dilakukan lewat analisis gender. Pada intinya Permendagri ini menginstruksi diseluruh unit pemerintahan di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbang), guna mengintegrasikan PUG ke dalam perencanaan serta penganggaran.

Komitmen pemerintah guna melakukan pengarusutamaan gender dapat dilihat lewat pengintegrasian isu gender dalam pembangunan. Dimana hal ini merupakan strategi untuk menciptakan kesetaraan serta keadilan gender yang mana tergapai saat berlangsung kesamaan posisi serta kedudukan guna laki-laki serta perempuan mendapat peluang, akses, partisipasi, kontrol serta kegunaan dari sumberdaya yang ada serta hak-haknya selaku manusia supaya

bisa berperan beserta berkontribusi di aktivitas politik ekonomi, sosial budaya serta terdapatnya kesamaan guna menikmati capaian pemanfaatan capaian pembangunan yang sepadan perempuan serta laki-laki (Rostanty, 2007:70).

Salah satu daerah yang ikut serta dalam meningkatkan kesetaraan gender yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Pemerintah Kabupaten Kendal berusaha mewujudkan pengarusutamaan gender dan pembangunan daerah yang responsif gender melalui dirumuskannya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kab Kendal Tahun Anggaran 2016-2021. Dalam dokumen perencanaan lima tahunan tersebut termuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan guna menggapai kesetaraan serta keadilan gender. Hal ini termuat di misi pembangunan daerah yakni menciptakan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dimana misi tersebut berusaha untuk memusnahkan diskriminasi diberagam aspek mencakup gender. Arah kebijakan guna penguatan di pengembangan SDM yang berkualitas, mencakup diindikasikan bersama naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang digiring guna membangun wilayah yang cerdas, kompetitif, adil, beradab serta berorientasikan IPTEK.

Gambar 1. 1 Perkembangan IPM Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018

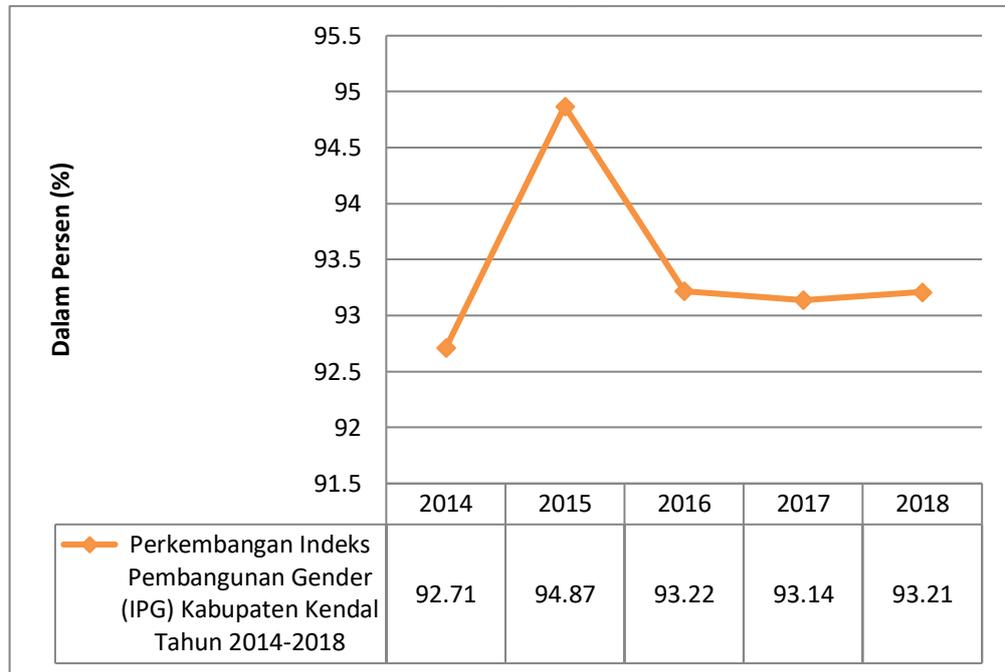


Sumber : di olah penulis dari BPS Kabupaten Kendal

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai deskripsi komprehensif tentang taraf penggapaian pembangunan manusia selaku efek dari aktivitas pembangunan yang dilakukan daerah. Makin tinggi nilai IPM sebuah daerah maka penggapai pembangunan manusianya makin baik. Capaian IPM dapat dikelompokkan jadi 4 golongan yakni rendah apabila $IPM < 60$, sedang apabila $60 \leq IPM < 70$, tinggi apabila $70 \leq IPM < 80$ serta amat tinggi apabila $IPM \geq 80$.

Berdasarkan data yang diolah penulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal bisa ditinjau IPM di Kabupaten Kendal tiap tahunnya masuk dalam kategori sedang di tahun 2014-2015 dan tinggi di tahun 2016-2018. Terlihat juga tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kendal tiap tahunnya mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Meski pencapaian dari tahun ke tahun tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terlihat meningkat dan masuk dalam kategori aman yaitu pada posisi tinggi, tentunya masih banyak hal yang perlu diperbaiki bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

Gambar 1. 2 Perkembangan IPG Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018

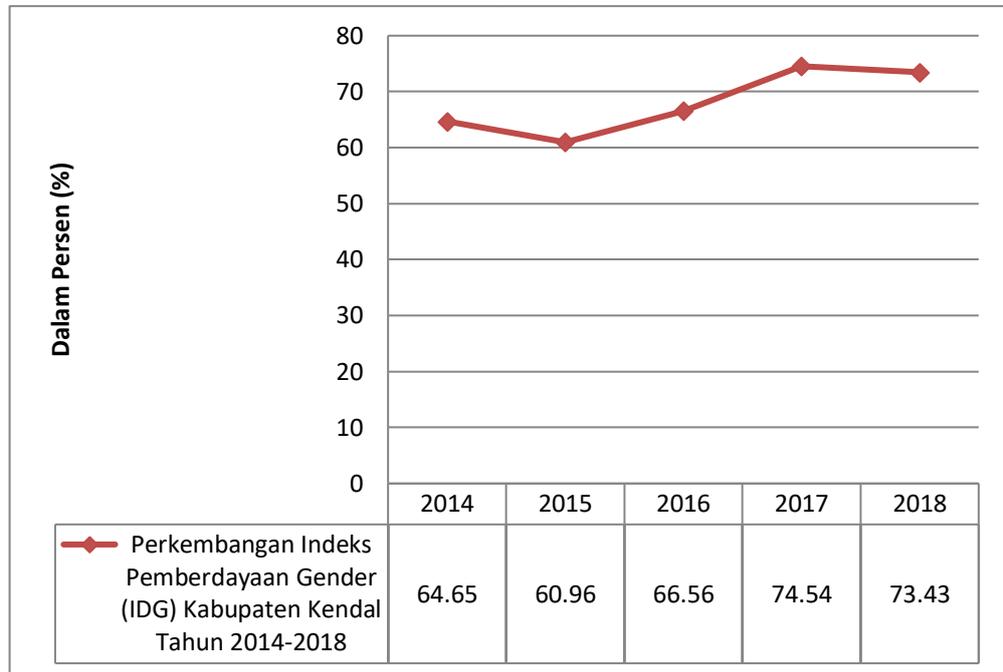


Sumber : di olah penulis dari BPS Kabupaten Kendal

IPG dipakai guna mengukur penggapaian dimensi serta variable yang sama layaknya IPM, namun menggunakan ketidakadilan penggapaian laki-laki serta perempuan. Makin kecil jarak angka IPG bersama angka 100, hingga kian setara pembangunan perempuan bersama laki-laki. Tetapi apabila makin besar jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) bersama angka 100, maka makin besar perbedaan pencapaian pembangunan perempuan serta laki-laki.

Berdasarkan data yang diolah penulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal dapat dilihat IPG di Kabupaten Kendal pencapaian tiap tahunnya memiliki jarak angka yang semakin kecil dengan nilai 100 dengan rata-rata 93,43%. Perihal itu memperlihatkan IPG di Kabupaten Kendal makin setara dalam pembangunan perempuan bersama laki-laki. Walaupun jarak angka yang semakin kecil bersama angka 100 tingkat IPG di Kabupaten Kendal tiap tahunnya mengalami ketidakstabilan karena mengalami naik turun jumlah persentasenya.

Gambar 1. 3 Perkembangan IDG Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018

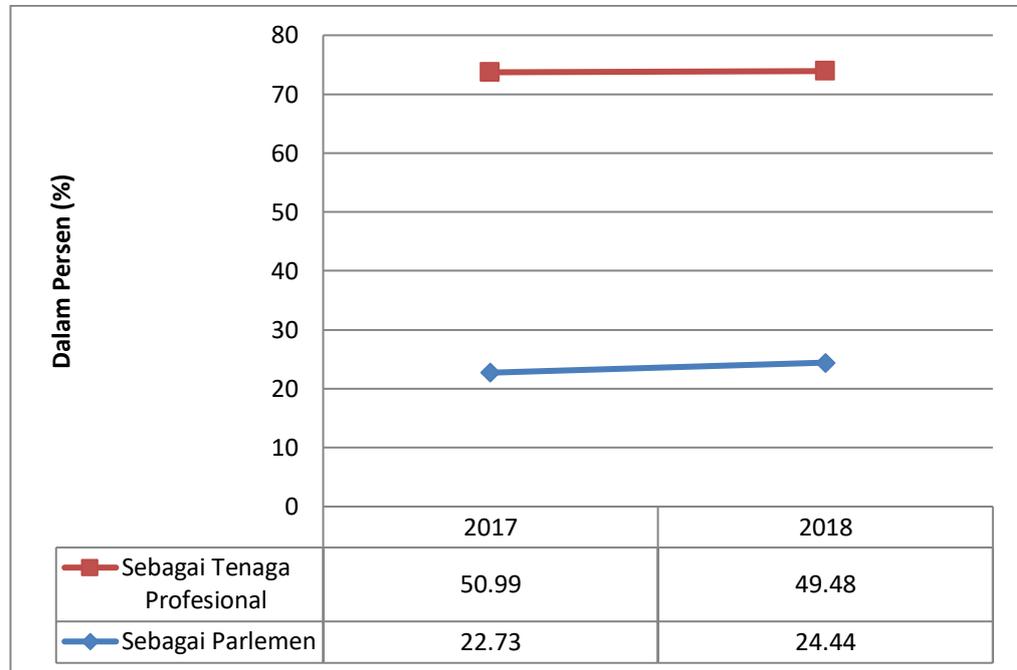


Sumber : di olah penulis dari BPS Kabupaten Kendal

IDG dipakai guna mengukur kesetaraan gender dan menunjukkan peranan aktif wanita dikehidupan ekonomi serta politik. Keterlibatan wanita di bidang politik melalui dalam parlemen, pengambilan keputusan dilihat dari kedudukan dan jabatan sebagai tenaga profesional dan ekonomi di ukur melalui sumbangan pendapatan perempuan.

Berdasarkan data yang diolah penulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal dapat dilihat Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Kendal memiliki rata-rata 68,03% dan tiap tahunnya mengalami ketidakstabilan karena mengalami naik turun jumlah persentasenya. Hal ini memperlihatkan IDG di Kabupaten Kendal berada di persentase yang sedang.

Gambar 1. 4 Perbandingan Perempuan Sebagai Tenaga Profesional dan Sebagai Parlemen di Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018



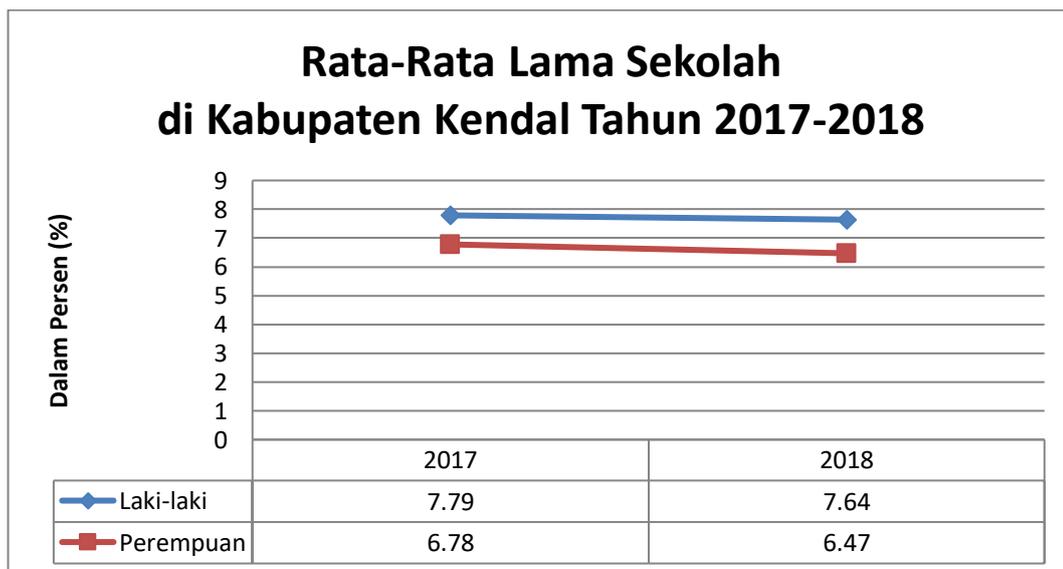
Sumber : di olah penulis dari BPS Kabupaten Kendal

Berdasarkan data yang diolah penulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal diatas menunjukkan peranan aktif perempuan dalam bidang politik melalui dalam parlemen, pengambilan keputusan dilihat dari kedudukan dan jabatan sebagai tenaga profesional. Terlihat peran perempuan sebagai parlemen tiap tahunnya mengalami penurunan dan masih dalam presentase yang rendah karena pencapaiannya kurang dari 50%. Terlihat juga peran perempuan jabatan sebagai tenaga profesional tiap tahunnya mengalami kenaikan dan masih dalam presentase yang sedang karena pencapaiannya berada di lebih dari 50% tetapi kurang dari 100%. Jika melihat beberapa grafik diatas, keterlibatan perempuan di bidang politik melalui dalam parlemen, pengambilan keputusan dilihat dari kedudukan dan jabatan sebagai tenaga profesional dan ekonomi di ukur melalui sumbangan pendapatan perempuan sebagai ukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Kendal.

Terdapatnya ketimpangan gender diberagam sektor pembangunan ialah esensi yang kerap diperjuangkan Pemerintah Daerah Kab Kendal dalam pencapaian penuh kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Mengingat hingga kini tengah ditemui kesenjangan penggapaian pembangunan laki-laki serta perempuan, perihal itu efek dari IPM, IPG serta IDG Kab Kendal yang tengah belum optimal, pada percepatan pembangunan guna perempuan tengah lebih melambat dibanding laki-laki. Dalam mewujudkan komitmen internasional lewat kesetaraan gender 50:50 di tahun 2030. Permasalahan utama gender yang terdapat di Kabupaten Kendal sendiri yaitu sebagai berikut : (RPJMD Kabupaten Kendal 2016-2021: 163)

1. Masih rendah kualitas serta peranan wanita dipembangunan;
2. Masih terdapatnya ketimpangan gender dirakyat;
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan guna kenaikan perekonomian keluarga;
4. Tengah minimnya lembaga PUG yang aktif diusaha penggapaian kesetaraan gender.

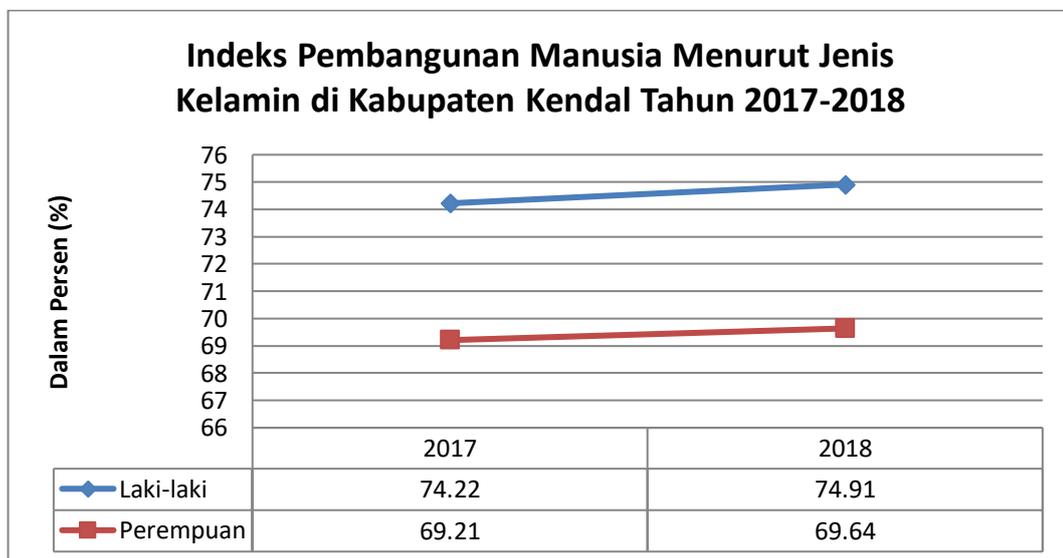
Gambar 1. 5 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018



Sumber : di olah penulis dari BPS Kabupaten Kendal

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal guna untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Berdasarkan data yang diolah penulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal dapat dilihat Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018 menurut jenis kelamin yaitu dari tahun ke tahun perbandingan jumlah rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan walaupun selisih persentasenya tidak terpaut jauh akan tetapi jumlahnya lebih besar laki-laki daripada perempuan. Hal ini dapat diartikan masih rendah kualitas serta peranan perempuan dalam pendidikan secara formal, karena minimnya perempuan dalam menyentuh pendidikan juga berdampak pada tingkat kesetaraan dan keadilan untuk perempuan itu sendiri. Pendidikan tidak dapat terlepas dari pembangunan, jika pendidikan rendah maka kontribusi dalam akses sumber-sumber produksi juga akan rendah karena perempuan berada di posisi yang rentan dan minim akses di pembangunan.

Gambar 1. 6 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018

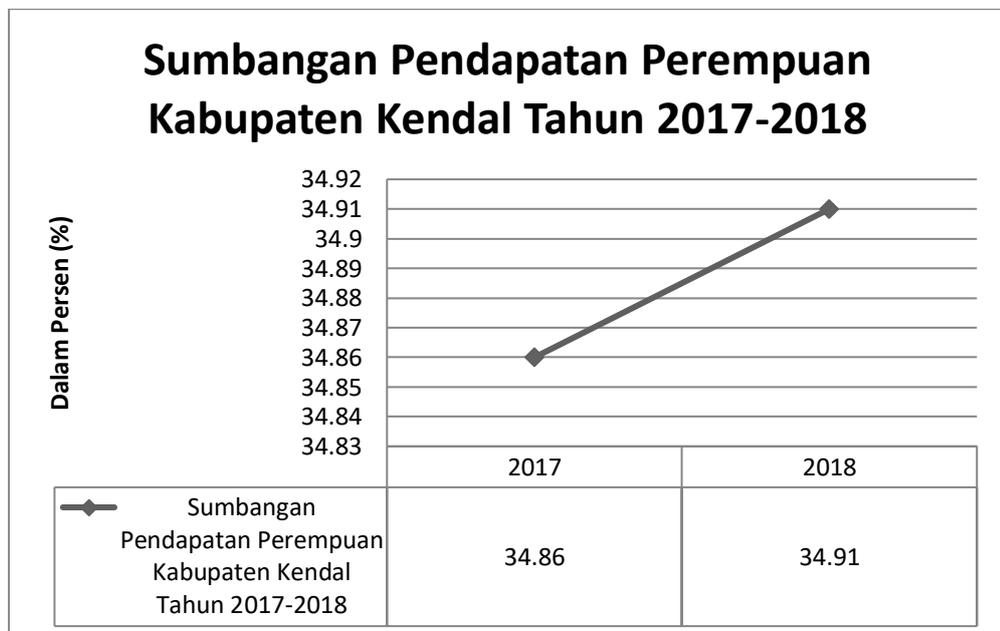


Sumber : di olah penulis dari BPS Kabupaten Kendal

Berdasarkan data yang diolah penulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal dapat dilihat Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018 menurut jenis kelamin yaitu dari tahun ke tahun

perbandingan jumlah indeks pembangunan manusia laki-laki dan perempuan walaupun selisih persentasenya tidak terpaut jauh akan tetapi jumlahnya lebih besar laki-laki daripada perempuan. Sebagaimana diketahui indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator utama pembangunan untuk menilai keberhasilan pembangunan pada kualitas hidup masyarakat meliputi berbagai bidang, sehingga dari data diatas dapat diartikan masih terdapatnya ketimpangan gender masyarakat khususnya bagi perempuan dalam memperoleh akses pembangunan.

Gambar 1. 7 Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018



Sumber : di olah penulis dari BPS Kabupaten Kendal

Berdasarkan data yang diolah penulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal sesuai data tabel menunjukkan peranan aktif perempuan dalam ekonomi di ukur melalui sumbangan pendapatan perempuan. Terlihat sumbangan pendapatan perempuan tiap tahunnya masih dalam presentase yang rendah karena pencapaiannya kurang dari 50%, walaupun tiap tahunnya mengalami kenaikan. Artinya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Kendal masih belum cukup tinggi dan belum optimalnya pemberdayaan perempuan guna kenaikan perekonomian keluarga.

Dengan demikian maka, dilihat dari penyajian beberapa data indeks dan penjelasannya diatas menunjukkan realita yang ada di lapangan khususnya di Kabupaten Kendal bahwa masih terdapat kesenjangan gender yang terjadi di Kabupaten Kendal terlebih kepada perempuan karena perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga keterwakilan dalam politik. Beberapa permasalahan seperti kualitas perempuan masih rendah, belum optimalnya pemberdayaan perempuan, minimnya lembaga pengarusutamaan gender dan permasalahan lainnya. Meskipun anggaran responsif gender ialah budget untuk mencukupi keperluan gender antara laki-laki serta perempuan pada, berpartisipasi dalam, memiliki kontrol atas serta mendapat kegunaan yang sama dari pembangunan. Kenyataannya di Kabupaten Kendal anggaran yang ada belum cukup mengakomodasikan kebutuhan gender khususnya pada perempuan sehingga masih terjadi adanya kesenjangan gender dalam pembangunan daerah. Padahal semua hal yang dijelaskan diatas berpengaruh langsung pada tercapainya kesetaraan pembangunan bagi laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini dimaksudkan guna melaksanakan kajian pada anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal selaku usaha guna menilik sejauh mana tingkat komitmen dan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal terhadap upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Penelitian ini jadi menarik guna dikaji serta diteliti lebih jauh karena akan melihat dari beberapa sudut pandang penerapan anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal dalam mengintegrasikan kebutuhan gender dan meminimalisir kesenjangan gender khususnya pada perempuan dengan pisau analisis mengkategorikan anggaran sesuai dengan target gendernya serta melihat kendala atau hambatan yang dialami pemerintah daerah dalam penerapan dan pelaksanaan anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang, maka persoalan yang hendak diteliti di studi ini ialah :

1. Bagaimana penerapan anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017-2018 ?
2. Apasaja kendala atau hambatan yang mempengaruhi dalam proses penerapan anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017-2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar permasalahan, maka tujuan dari studi ini ialah :

1. Guna mengetahui penerapan anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017-2018.
2. Untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan yang mempengaruhi dalam proses penerapan anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan diadakannya studi ini maka diharap bisa memberi kontribusi yang sesuai, di studi ini terdapat 2 kegunaan yang ingin dicapai penulis adalah:

1.4.1 Secara Teoritis

Capaian studi ini nantinya diharap bisa memberi manfaat bagi perkembangan ilmu sosial dan ilmu politik umumnya serta memberikan kontribusi yang positif untuk kepentingan Pemerintah Daerah, serta menghasilkan bahan pustaka serta sebuah konsep yang bisa selaku materi studi berikutnya yang berguna sebagai referensi maupun pembangunan dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam proses implementasi anggaran responsif gender dan kendalanya di Pemerintah Daerah. Selain itu studi ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tepat dan akurat sesuai dengan pemahaman disipin Ilmu Pemerintahan.

1.4.2 Secara Praktis

Capaian studi ini diharap bisa memberi kontribusi ilmu di pengembangan anggaran responsif gender di Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Kendal. Manfaat yang ingin penulis capai ialah antara lain :

1. Bagi Peneliti

Harapan peneliti capaian studi ini bisa menambahkan wawasan dan mengembangkan ilmu berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya yang berhubungan dengan anggaran responsif gender pada di Kabupaten Kendal, serta diharapkan juga dapat menemukan formulasi pemecahan permasalahan yang tepat dan efektif.

2. Bagi Pemerintah

Sesuai capaian studi ini diharap dapat menjadi referensi bahan pertimbangan serta penambahan ilmu pada Kabupaten Kendal dan lembaga berkaitan guna menyelesaikan permasalahan yang ada didalam anggaran responsif gender di lingkungan Pemerintah Daerah pada masa mendatang. Beserta memberi saran pada pemerintah kota/kabupaten untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kinerjanya dalam menganggarkan anggaran responsif gender.

3. Bagi Masyarakat

Harapan penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengertian pada seluruh lapisan rakyat tentang pentingnya penganggaran yang responsif gender yang ada di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Daerah, dan diharapkan penganggaran responsif gender mampu untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kesenjangan gender serta menciptakan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan dari perspektif gender melalui anggaran responsif gender.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Studi dengan topik yang serupa dengan penelitian ini telah banyak dipublikasikan sebelumnya. Pada bagian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk membandingkan studi yang hendak dilaksanakan bersama beberapa studi telah dilakukan individu lainnya. Perihal yang akan dipaparkan yaitu mengenai penelitian terdahulu, tujuannya, temuannya, serta perbedaannya bersama studi ini.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Tentang Anggaran Responsif Gender

No	Judul Penelitian	Nama Peneiti	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	<i>“Analisis Anggaran Responsif Gender dalam APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2014-2016”</i>	Asep Nur Hidayatulloh (Tahun 2018)	Menganalisis APBD Pemerintah Kab Tuban saat melakukan anggaran yang responsif gender tahun 2014-2016	Menunjukkan komitmen kepla daerah Kab. Tuban tentang anggaran responsif gender cuma sebatas di alokasi APBD serta tak memakai analisis gender. <i>Gender Analysis Pathway</i> serta <i>Gender Budget Statement</i> pada perencanaan serta penyelenggaraan Anggaran Responsif Gender yang selaras

				bersama Permendagri No. 67 Tahun 2011, mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarutamaan Gender di Daerah. Pada pengalokasian APBD dimulai 2014 berkisaran di angka 3,5% dari total APBD, tahun 2015 3,8% dari total APBD, serta 2016 1,9% dari total APBD.
2	<i>“Analisis Anggaran Responsif Gender pada APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016”</i>	Muhammad Alfatih Akbar (Tahun 2018)	Mengetahui rencana serta penganggaran yang responsif gender di Pemerintah Daerah Kab. Temanggung pada Tahun 2016	Memperlihatkan penyelenggaraan serta eksekusi PPRG yang dilakukan SKPD ataupun Badan di Pemerintah Daerah Kab.Temanggung masih belum optimal, sebab dari capaian temuan studi dari

				<p>36 SKPD atau Badan cuma terdapat 6 SKPD atau Badan yang bisa melakukan PPRG yang diintegrasikan bersama program serta aktivitas yang dilakukan. Maka bisa dikonklusikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung masih belum optimal di penyelenggaraan PPRG.</p>
--	--	--	--	---

Sumber : Di olah oleh peneliti

Perbedaan studi ini dengan dua studi sebelumnya yaitu berbeda lokasi penelitiannya dan teori yang digunakan dalam menganalisis anggaran responsif gender. Fokus dari studi ini sendiri ialah guna menganalisis penerapan anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017-2018 dengan menggunakan serta mengidentifikasi kendala atau hambatan yang mempengaruhi proses pelaksanaan penganggaran responsif gender.

1.5.2 Kajian Teori Gender

1.5.2.1 Gender dan Sex

Basisnya perbedaan perempuan serta laki-laki bisa ditinjau dari peranan biologis menurut jenis kelaminnya dan peran gendernya. Guna mengerti konsep gender digolongkan kata gender bersama kata seks (jenis kelamin). Definisi jenis kelamin ialah pengelompokan biologis yang didasarkan terhadap sifat reproduksi potensial. (Saptiawan dan Sugihastuti,2007:5) Peran biologis menurut jenis kelaminnya sifatnya menetap serta tak akan berubah sepanjang waktu, contohnya peranan wanita secara biologis ialah hamil, melahirkan, serta menyusui serta peranan laki-laki secara biologis adalah membuahi (*spermatozoa*). Sedangkan konsep lainnya mengenai gender, yaitu ialah elaborasi sosial dari sifat biologis yang melekat di laki-laki atau perempuan yang merupakan hasil konstruksi yang diciptakan manusia secara sosial ataupun kultural (Fakih,2008:8) contohnya perempuan terkenal lemah lembut, emosional, cantik dan keibuan, sementara laki-laki diasumsikan kuat, rasional dan perkasa. Peranan gender disisi lainnya, ialah perbedaan sifat, peranan, fungsi, serta kedudukan antara laki-laki serta perempuan berdasar relasi sosial budaya yang diberi dampak struktur rakyat yang lebih luas.

Tabel 1. 2 Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender

Jenis Kelamin	Gender
Mengaitkan beda organ biologis pria serta wanita, utamanya dibagian alat reproduksi.	Mengaitkan perbedaan peranan,kegunaan, tanggung jawab pria serta wanita selaku capaian kesepakatan ataupun capaian konstruksi (bentukan) rakyat.
Peranan reproduksi tak bisa bertransformasi: Sekali jadi perempuan serta memiliki rahim, maka selamanya hendak jadi perempuan serta kebalikannya.	Peranan sosial bisa bertransformasi: Peranan perempuan selaku ibu rumah tangga bisa bertransformasi jadi peranan pencari nafkah.
Peranan reproduksi tak bisa ditukar: Tak dimungkinkan pria melahirkan beserta wanita membuahi.	Peranan sosial bisa ditukar: Guna waktu tertentu, bisa saja suami tak mempunyai pekerjaan hingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, istri tukar peranan guna bekerja hingga ke luar negeri.
Peranan reproduksi berlaku sepanjang masa.	Peranan sosial bergantung di masa serta kondisi.
Peran reproduksi berlaku dimana saja.	Peran sosial tergantung kultur rakyat tertentu.
Peranan reproduksi berlaku guna seluruh kelas/strata sosial.	Peranan sosial beda antara satu kelas/strata sosial bersama lain.
Peranan reproduksi bersumber dari Tuhan ataupun sifatnya kodrati.	Peranan sosial ialah capaian buatan manusia, serta sifatnya kodrati.

Sumber : *Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah*, KEMENPPPA,2010

Dengan demikian, perbedaan ini sangat penting sebab bersama mengenal perbedaan antara jenis kelamin yang sifatnya tetap atau tidak dapat diubah dan gender selaku sesuatu yang tak tetap atau

permanen, sehingga mempermudah kita guna membuat penggambaran mengenai realitas relasi wanita serta pria secara lebih tepat serta selaras bersama fakta yang terdapat di rakyat.

1.5.2.2 Isu Gender

a. Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender berarti kesepadanan keadaan serta kedudukan guna perempuan serta laki-laki guna mendapat peluang serta haknya selaku manusia supaya bisa berfungsi serta berkontribusi diberagam aktivitas pembangunan serta kesepadanan saat menikmati capaian yang efeknya seimbang. Sedang keadilan gender berarti *treatment* adil guna wanita serta pria disemua prosedur ketetapan pembangunan bersama menimbang beda pengalaman, keperluan, kesukaran, kendala selaku wanita serta pria (Pedoman Teknis Penyusunan GAP dan GBS,2013:8-9).

Dengan demikian, kesetaraan serta keadilan gender ialah sebuah keadaan yakni porsi serta siklus sosial wanita serta pria setara, serasi, seimbang serta harmonis. Keadaan ini bisa tercipta jika ada perlakuan adil antara perempuan serta laki-laki. Implementasi kesetaraan serta keadilan gender wajib memfokuskan persoalan kontekstual serta situasional, bukan berdasar pengkalkulasian secara matematis serta sifatnya tak universal.

b. Permasalahan Kesenjangan Gender

Menurut Rahayu dalam Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik Volume 2, Nomor 1, Juni 2016 menjelaskan mengenai ketertinggalan perempuan memperlihatkan terdapatnya ketidakadilan serta ketidaksetaraan laki-laki serta perempuan di Indonesia, perihal itu bisa tampak dari perbedaan pemilahan peranan, fungsi, tugas serta tanggung jawab beserta posisi pria serta wanita baik secara langsung ataupun tak langsung, serta efek sebuah aturan perundangan ataupun ketetapan sudah

memunculkan beragam ketidakadilan sebab sudah berakar di adat, norma atau struktur rakyat. Gender masih dimaknai rakyat selaku beda jenis kelamin. Rakyat belum mengerti gender ialah sebuah konstruksi budaya mengenai peranan fungsi serta tanggung jawab sosial pria serta wanita. Keadaan itu menyebabkan kesenjangan peranan sosial serta tanggung jawab hingga berlangsung diskriminasi, pada pria serta wanita. Hanya saja jika dibanding, diskriminasi pada wanita kurang menguntungkan dibanding pria.

Menurut Fakih Mansour dalam Perempuan di Sektor Publik (Siti,2008:458) menjabarkan ketidakadilan gender termanifestasi diberagam wujud ketidakadilan, utamanya di perempuan; contohnya marginalisasikan yang berhubungan bersama akses ekonomi, subordinasi yang berhubungan bersama politik utamanya menyangkut proses penentuan ketetapan dan penguasaan kekuasaan, stereotipe/pelabelan negatif sekalian *treatment* diskriminatif, kekerasan pada wanita baik berwujud invasi fisik ataupun integritas mental psikologis, beban kerja lebih berkaitan dengan pembagian kerja domestik dan publik. Manifestasi ketidakadilan gender itu masing-masingnya tak mampu dipisahkan, saling terkait serta berdampak secara dialektis.

1.5.2.3 Integrasi Isu Gender

a. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam (Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah,2010:29) Pengarusutamaan gender (PUG) sudah jadi komitmen internasional serta nasional semenjak dikukuhkan *Beijing Platform For Action* di 1995. PUG ialah strategi yang diciptakan guna mengintegrasikan gender jadi satu dimensi integral dari perencanaan, pembuatan, penyelenggaraan, pemantauan, serta pengevaluasian terhadap

ketetapan serta program pembangunan nasional. PUG dimaksudkan guna menggapai keadilan serta kesetaraan gender yang ialah usaha guna menegakkan hak perempuan serta laki-laki atas peluang, pengakuan serta penghargaan yang sepadan guna bernegara, berbangsa, serta bermasyarakat. Penyelenggaraan PUG di pembangunan ialah strategi guna memastikan perempuan serta laki-laki memiliki akses yang sama pada sumber daya, bisa berkontribusi saat proses penetapan keputusan, mempunyai peluang yang sama guna menjalankan kendali, serta mendapat kegunaan yang sama pada pembangunan.

Sedangkan sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 PUG ialah suatu proses yang meletakkan analisis gender ke program kerja serta semua aktivitas instansi pemerintahan serta organisasi kemasyarakatan lain, dimulai dari tahapan perencanaan program, penyelenggaraan program hingga monitoring serta evaluasi program itu. Maka diterbitkan PP No. 8 Tahun 2008 mengenai Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pada PP No. 8 Tahun 2008 itu dikatakan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten atau Kota saat membuat rencana kerja daerahnya wajib menimbang analisis kemiskinan serta kesetaraan gender saat menetapkan kebijakan, program kegiatan beserta aktivitas pembangunan. (Kastari,2011) Menindaklanjuti peraturan tersebut supaya PUG bisa dijalankan dengan efektif serta efisien maka diciptakan kelembagaan PUG berwujud Kelompok Kerja (Pokja) yang menjadi sarana berkonsultasi guna pelaksana serta penggerak PUG dari beragam instansi dan lembaga di daerah serta *Gender Focal Point* sebagai lembaga atau instansi yang mampu melaksanakan PUG kedalam tiap kebijakan, program serta aktivitas pembangunan yang hendak dilakukan kedepannya.

b. **Pencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**

PPRG ialah alat guna menuntaskan terdapatnya kesenjangan akses, partisipasi, kendali serta kegunaan saat penyelenggaraan pembangunan perempuan serta pria yang selama ini tengah ada, akibat dari konstruksi sosial serta budaya bersama maksud menciptakan anggaran yang lebih berkeadilan. (Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Generik, KPPA RI, 2010: 23)

PPRG, bukan suatu proses yang terpisahkan dari sistem yang telah ada, serta bukan juga pembuatan perancangan serta penganggaran khusus guna wanita yang terpisahkan dari laki-laki. Pembuatan PPRG bukan tujuan akhir, tetapi ialah suatu kerangka kerja ataupun alat analisis guna menciptakan keadilan di penerimaan kegunaan pembangunan.

PPRG adalah dua proses yang saling berkaitan serta terintegrasikan. Ini sejumlah konsep mengenai PPRG yakni: (Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Generik, KPPA RI, 2010)

Pengertian dari perencanaan yaitu perencanaan yang responsif gender ialah sebuah proses penetapan keputusan guna membuat program ataupun aktivitas yang hendak dilakukan dimasa depan guna menanggapi isu ataupun persoalan gender ditiap bidang. Perencanaan yang responsif gender ialah perencanaan yang dilaksanakan bersama memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, keperluan serta persoalan.

Pengertian dari penganggaran yaitu pembuatan anggaran yang responsif gender untuk menanggapi secara adil keperluan tiap warga negara, laki-laki ataupun perempuan bersama mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kendali serta kegunaan dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tak memisah anggaran guna perempuan serta laki-laki; bukanlah guna basis menambahkan

alokasi anggaran; serta bukanlah bermakna tambahnya anggaran khusus guna perempuan. Anggaran yang responsif gender memfokuskan keperluan, persoalan, aspirasi, pengalaman perempuan serta laki-laki, beserta memberikan kegunaan yang adil pada perempuan serta laki-laki

PPRG wajib menimbang 4 unsur yakni: akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang dilaksanakan dengan setara antara perempuan serta laki-laki. Perencanaan serta penganggaran menimbang aspirasi, keperluan serta persoalan perempuan serta laki-laki, baik di proses pembuatannya ataupun saat penyelenggaraan aktivitasnya.

1.5.3 Kajian Teori Kebijakan Publik

1.5.3.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian kebijakan (policy) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan Negara. Kebijakan publik adalah domain dari pemerintahan, atau kekuasaan pemegang pemerintahan, maka kebijakan publik adalah bentuk faktual

dari upaya setiap pemerintah untuk mememanajemi kehidupan bersama yang disebut Negara dan bangsa. (Mustari. 2015:20)

Kebijakan publik dapat disimpulkan kebijakan publik adalah suatu instrumen yang dibuat oleh pemerintah yang berbentuk aturan-aturan umum dan atau khusus baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi pilihan-pilihan tindakan yang merupakan keharusan, larangan dan atau kebolehan yang dilakukan untuk mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dengan tujuan tertentu.

1.5.3.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah bagian terpenting dari kegiatan dalam proses kebijakan publik karena berkaitan erat dengan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan tumbuhnya kesadaran bahwa kebijakan pemerintah di banyak bidang kurang atau bahkan tidak efektif, terutama disebabkan oleh masalah-masalah yang timbul pada pelaksanaannya. Sebagai alat administrasi hukum, fokus perhatian dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku agar memberikan dampak dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan. Suatu kebijakan atau program diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersamasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Dengan adanya kebijakan implementasi, yang merupakan bentuk konkret dari konseptualisasi dalam kebijakan formulasi, tidak secara otomatis merupakan garansi berjalannya suatu program dengan baik. Oleh karena itu suatu kebijakan implementasi pada umumnya

satu paket dengan kebijakan pemantauan atau monitoring. Mengingat kebijakan implementasi adalah sama peliknya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya. (Mustari. 2015:140)

Implementasi akan berguna jika dalam proses kebijakan tidak hanya sampai pada formulasi saja. Dengan adanya implementasi, masyarakat bisa merasakan apa yang dilakukan pemerintah bagi pemenuhan kebutuhan mereka. Implementasi dapat dirasakan dan bisa menjadi tolak ukur bagaimana program-program yang telah direncanakan itu telah menjadi sebuah kebijakan yang nyata.

1.5.4 Kajian Teori Anggaran

1.5.4.1 Anggaran Daerah

Anggaran yaitu acuan aksi yang hendak dilakukan pemerintah mencakup perencanaan, pendapatan, belanja, transfer, serta pembiayaan yang diukur di satuan rupiah yang dibuat berdasar pengklasifikasian tertentu secara sistematis guna 1 periode. Sedangkan pnganggaran merupakan sebuah proses membuat perencanaan keuangan yakni pendapatan serta pembiayaan, lalu mengalokasi uang ke tiap aktivitas selaras bersama fungsi serta sasaran yang akan digapai yang lalu digolongkan ke dalam program berdasar tugas serta tanggungjawab dari satuan kerja tertentu. (Nurkholis dan Khusaini, 2019 : 4)

Menurut Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan anggaran daerah ialah perencanaan keuangan yang jadi basis guna layanan publik Di Indonesia. dokumen anggaran daerah dinamai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik guna provinsi ataupun kabupaten serta kota. APBD hakekatnya ialah rencana pendapatan, belanja daerah, serta pembiayaan di sebuah daerah guna setahun. APBD ialah bentuk

tahunan dari perencanaan jangka panjang beserta menengah daerah yang diciptakan berdasar visi misi kepala daerah. APBD disiapkan oleh pemerintah daerah, disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga akhirnya jadi produk hukum berwujud Peraturan Daerah yang wajib diiringi semua lembaga di daerah (Khusaini, 2018:90)

Menurut Fadillah (2019:87) struktur APBD yang mengacu pada Permendagri No 13 Tahun 2006, struktur APBD ialah satu kesatuan yang mencakup: Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; serta Pembiayaan Daerah. Struktur APBD itu digolongkan berdasar urusan pemerintahan serta organisasi yang bertanggung jawab melakukan urusan pemerintahan selaras bersama aturan perundangan.

1.5.4.2 Anggaran Responsif Gender (ARG)

ARG ialah bentuk dari kebijakan anggaran yang mengakomodasikan keadilan guna perempuan serta laki-laki guna mendapat akses, manfaat, partisipasi, penetapan keputusan, serta mengendalikan sumber daya beserta kesetaraan pada peluang saat menikmati capaian pembangunan. Konsep anggaran responsif gender mengedepankan keadilan di alokasi anggaran, perihal itu supaya belanja pemerintah yang merespon keperluan gender memberi efek kesetaraan guna mencukupi keperluan laki-laki serta perempuan.

ARG mempunyai ciri-ciri yaitu: (Sri Mastuti Rinusu, 2008:35)

- a. ARG bukanlah anggaran yang terpisahkan guna laki-laki ataupun perempuan.
- b. Berfokus kepada kesetaraan gender serta PUG diseluruh sisi penganggaran baik ditingkat nasional maupun local.
- c. Menaikkan partisipasi aktif *stakeholder* perempuan.
- d. Monitoring serta evaluasi belanja dan penerimaan pemerintah dilaksanakan secara responsif gender.
- e. Menaikkan efektivitas pemakaian sumber guna menggapai kesetaraan gender serta pengembangan sumber daya manusia.

- f. Lebih mengedepankan re-prioritas dibanding semua belanja pemerintah.
- g. Lebih menekankan re-orientasi pada program-program pemerintah di berbagai sektor daripada menambah anggaran pada sector khusus.

1.5.4.3 Analisis Anggaran Responsif Gender

Menurut KPPA RI dalam penerapannya, Anggaran Responsif Gender dibagi dalam 3 golongan (Ismi, 2013:18), yaitu :

1. Anggaran khusus target gender ataupun anggaran guna penunaian keperluan spesifik berdasar jenis kelamin ialah pengalokasian anggaran yang dipaki guna mencukupi keperluan basis khusus perempuan ataupun laki-laki berdasar capaian analisis gender.
2. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender ataupun anggaran guna *affirmative action* atau tindakan afirmasi ialah pengalokasian anggaran guna penguatan pelembagaan PUG, baik perihal pendataan ataupun kenaikan kapasitas sumberdaya manusia.
3. Anggaran kesetaraan gender ataupun pengeluaran umumnya ialah pengalokasian anggaran guna menuntaskan persoalan kesenjangan gender beragam sektor pembangunan mencakup diantaranya kesenjangan di akses, partisipasi, kontrol serta kegunaan pada sumberdaya pembangunan.

Menurut Budlender (2002: 53-54) dijabarkan 3 golongan guna menilai pembelanjaan pemerintah, yakni:

1. *Gender specific expenditures: these are allocations to programmes that are specifically targeted to groups of women, men, boys or girls, such as programmes on men's health (e.g., prostate cancer) or violence against women.* (Pengeluaran khusus gender: ini ialah pengalokasian guna program yang secara khusus ditargetkan untuk kelompok perempuan, laki-

laki, anak laki-laki atau perempuan, misalnya program tentang kesehatan laki-laki (misalnya, kanker prostat) ataupun kekerasan terhadap perempuan.)

2. *Expenditures that promote gender equity within the public service: these are allocations to equal employment opportunities, such as programmes that promote equal representation of women in management and decisionmaking across all occupational sectors, as well as equitable pay and conditions of service. This is distinct from programmes that promote the employment of equal numbers of women and men.* (Pengeluaran yang mempromosikan kesetaraan gender dipelayanan publik: ini ialah pengalokasian guna peluang kerja yang setara, seperti program yang mempromosikan keterwakilan perempuan yang setara dalam manajemen dan pengambilan keputusan diseluruh bidang pekerjaan, beserta gaji dan kondisi layanan yang adil. Ini berbeda dari program yang mempromosi pekerjaan bersama total perempuan dan laki-laki yang sama.)
3. *General or mainstream expenditures: these are allocations that are not covered in the two categories above (A & B). The analysis focuses on the differential impact of the sectoral allocations on women and men, boys and girls. Although the analysis is challenging due to the lack of gender disaggregated data in many instances, these expenditures are also the most critical because more than 99 per cent of government expenditure usually falls into this category.* (Pengeluaran umum atau arus utama: ini ialah pengalokasian yang tak tercakup dalam 2 golongan (A serta B). Analisis ini berfokus kepada efek diferensial dari pengalokasian sektoral pada perempuan serta laki-laki, anak laki-laki serta perempuan. Meskipun analisis ini menantang sebab kurangnya data

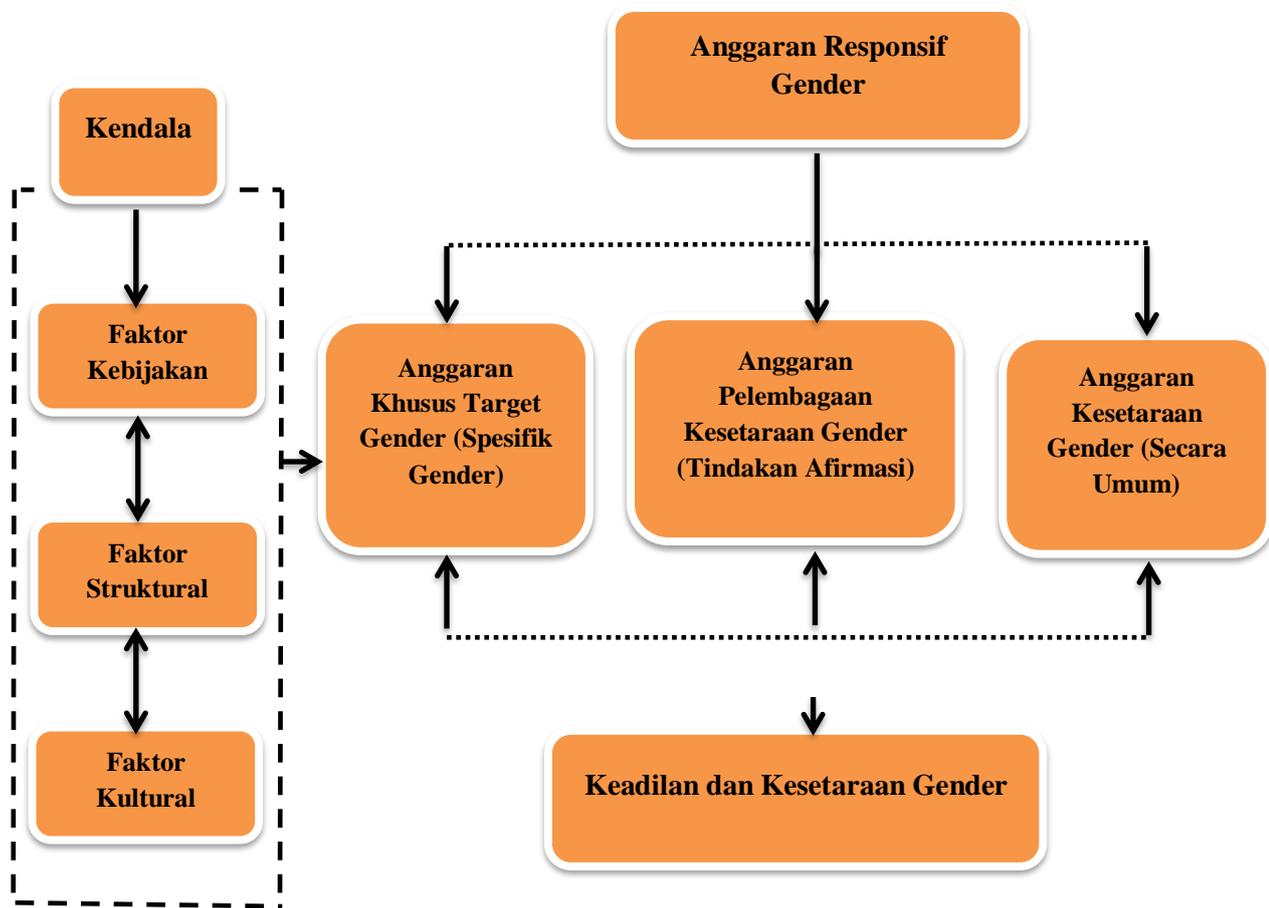
terdisagregasi gender dalam banyak kasus, pengeluaran ini yang paling penting pula sebab > 99 persen pengeluaran pemerintah biasanya termasuk dalam kategori ini.)

1.5.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual mengenai hubungan teori bersama berbagai faktor yang sudah diidentifikasi selaku persoalan yang penting dengan menjabarkan secara teoritis pertautan antar variabel yang hendak dikaji sehingga menjadi dasar dalam penyusunan paradigma penelitian. Oleh karena itu untuk mengetahui alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka terlebih dahulu perlu diketahui penjelasan secara konseptual.

Fokus pada penelitian ini adalah penerapan anggaran responsif gender yang dianalisis menggunakan kategori anggaran responsif gender berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta untuk kendala atau hambatan yang dihadapi yang meliputi kendala kebijakan, struktural maupun kultural. Untuk mengetahui lebih jelasnya fokus pada penelitian ini mengenai konsep kerangka berfikir, maka bisa ditinjau di gambar berikut ini :

Gambar 1. 8 Kerangka Berpikir



Keterangan :

————> : Fokus penelitian

.....> : Indikator

1.6 Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dimaknai selaku sebuah aktivitas ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis serta mempunyai maksud tertentu baik praktis ataupun teoritis (J.R Raco, 2010:5). Dianggap selaku aktivitas ilmiah sebab studi bersama aspek ilmu serta teori. Dikatakan terencana sebab studi wajib direncanakan dengan memperhatikan waktu dana dan aksesibilitas pada lokasi serta dana.

Menurut Sugiyono metode penelitian basisnya ialah sebuah cara yang sifatnya ilmiah guna mendapat data bersama tujuan serta manfaat tertentu (Sugiyono, 2012:2) Maka tujuan umum penelitian ialah guna memecahkan persoalan, maka prosedur yang hendak dilaksanakan wajib relevan bersama persoalan yang sudah ditetapkan.

1.6.1 Desain Penelitian

Silalahi (2012:180) menjabarkan desain penelitian ialah perencanaan serta struktur pengecekan yang dirancang sedemikian rupa hingga peneliti hendak bisa mendapat jawaban. Berdasar persoalan yang dikaji, macam studi yang dipakai desain penelitian kualitatif bersama tipe penelitian sifatnya deskriptif yang memberi analisis pada deskripsi gejala yang berlangsung di lapangan selaras bersama kenyataan. Alasan itu disebabkan hendak mempelajari kejadian serta proses yang berlangsung di lapangan. Penelitian kualitatif ialah studi yang sistematis yang dipakai guna menganalisis ataupun meneliti sebuah objek terhadap latar alamiah tanpa terdapat manipulasi didalamnya serta tiada uji hipotesis. Memakai metode yang alamiah, capaian studi yang diperoleh berdasar ukuran kuantitas, tetapi makna (sisi kualitas) dari kejadian yang diobservasi (Andi 2011:24)

Studi ini memakai desain penelitian kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan keadaan nyata yang berlangsung di lapangan dengan melaksanakan analisis disetiap fenomena yang dijumpai. Pada penelitian kualitatif deskriptif peneliti memusatkan bersama pertanyaan penelitian guna mengarah kepada tergapainya penghimpunan data secara langsung. Berdasar pengertian yang ada peneliti memakai metode penelitian kualitatif, disebabkan peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana penerapan dari anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017-2018 dan kendala yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan yang ada di lapangan.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Berdasar judul studi ini, maka penulis mengambil tempat di wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Tempat penelitian ini dipilih dengan keinginan untuk mengetahui bagaimana penerapan anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017-2018 sudah berjalan optimal atau belum, serta ingin menyumbangkan hasil penelitiannya demi terciptanya kesetaraan gender di Kabupaten Kendal, serta juga menimbang alokasi dana serta mudahnya akses peneliti.

1.6.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah individu yang dimintai guna memberi penjelasan mengenai sebuah fakta ataupun argumen yang dituju untuk diteliti oleh peneliti sebagai sumber informasi atau sampel. (Moleong, 2010:132) menggambarkan subyek studi selaku informan, yang maknanya individu dilatar studi yang dimanfaatkan guna memberi informasi mengenai kejadian serta keadaan latar studi.

Pada penelitian kualitatif yang dimaksudkan subyek studi ialah informan yang memberi data studi lewat wawancara. Pada studi ini peneliti memakai *purposive sample*, yakni penetapan sampel dengan sengaja bersama persyaratan sampel yang dibutuhkan ataupun dinamai sampel yang ditetapkan dengan sengaja. Oleh karena itu informan yang ditetapkan di studi ini yakni :

- a. Ibu Ratih Junia Kartika Sari, S.E. M.Si. selaku Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal.
- b. Bapak Stefanus Anggoro Trisanto, S.Sos. selaku Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.
- c. Ibu Ririn Erna A, S.E selaku Staff Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal.

- d. Ibu Rochatun, S.Sos selaku Kasie Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.
- e. Bapak Danang Andrian, S.KM. selaku Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.

1.6.4 Jenis Data

Guna menggapai seluruh maksud penelitian, peneliti butuh menetapkan dengan tepat macam data ataupun informasi yang diperlukan sebab bisa membantu peneliti membuat pertanyaan bersama klasifikasi respon yang pas. Bermanfaat guna perancang survei guna memikirkan pertanyaan selaku penghimpun informasi dari golongan utama ialah opini, sikap, serta motif; kepercayaan serta persepsi, perilaku, fakta serta atribut, serta pengetahuan. Menurut Suwandi Basrowi (2008 :169) Jenis data yang dipakai dalam penelitian kualitatif berwujud data bersama wujud:

- a. Kata-kata dan tindakan

Kata-kata atau aksi individu yang diobservasi ataupun diwawancarai ialah sumber data yang utama. Pencatatan sumber data utama lewat wawancara ataupun pengobservasian berguna di dalam capaian upaya perpaduan aktivitas mengamati, melihat, mendengar serta bertanya. Sumber data utama dicatat dengan catatan tertulis ataupun melalui rekaman baik video atau audio, pengambilan foto, atau film yang bermaksud guna mendapat suatu informasi yang yang berhubungan bersama anggaran responsif gender.

- b. Sumber tertulis

Sesuai sumber data, bahan tambahan yang bersumber dari sumber tertulis adalah buku serta majalah ilmiah, dari arsip, berkas pribadi serta resmi yang berkaitan dengan anggaran responsif gender.

- c. Foto

Foto adalah alat yang digunakan untuk keperluan penelitian kualitatif sebab bisa di pakai dalam beragam kebutuhan. Foto menciptakan data

deskriptif yang cukup berharga serta kerap dipakai guna menelaah segi subyektif serta capaiannya kerap dianalisis secara induktif.

d. Data Statistik

Penelitian kualitatif kerap memakai data statistik yang sudah tersedia selaku penambahan sumber data guna peneliti. Data statistik bisa membantu memberikan suatu dekripsi mengenai kecondongan subjek di latar belakang studi.

1.6.5 Sumber Data

Pada penelitian kualitatif ini data yang dipakai ialah data primer dan sekunder, dengan penjelasan yakni :

a. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh dari sumber pertama (data yang tengah asli belum di olah) data primer diperoleh dari capaian wawancara dengan responden. Dalam studi ini responden yang akan dituju yaitu Instansi Pemerintahan terkait dalam proses berjalannya panggaran responsif gender di Kabupaten Kendal.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data primer yang telah di olah lebih lanjut serta siap ditampilkan. Data sekunder didapat lewat menyelenggarakan studi kepustakaan (*library research*) bersama mendalami aturan perundangan, berkas ataupun buku yang terdapat hubungannya bersama persoalan ini serta doktrin. Data sekunder mencakup : literatur, jurnal ilmiah, surat kabar ataupun koran, internet, jurnal, tabel/grafik serta majalah yang terdapat hubungannya bersama studi ini.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Penghimpunan data ialah beragam cara yang dipakai guna menghimpun data, mengambil dan/atau menjaring data yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik penghimpunan data amat erat korelasinya dengan persoalan studi yang hendak dituntaskan. Persoalan

memberikan arah serta mempengaruhi penetapan teknik pengumpulan data. Di studi ini peneliti memakai teknik pengumpulan data:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah wujud komunikasi langsung peneliti bersama narasumber. Capaian wawancara berikutnya hendak dicatat langsung, pencatatan dilaksanakan dimuka responden ataupun informan. Wawancara yang dilakukan penulis dengan responden yaitu dengan cara tanya jawab, antara penulis bersama subjek penyelenggaraan wawancara bisa dijalankan secara langsung berhadapan bersama subjek penelitian (responden) serta dilaksanakan tak langsung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data lewat proses menyelenggarakan ataupun meninjau ulang berkas yang sudah tersedia bersama mendalami lagi informasi yang sudah tersimpan. Pengumpulan berkas tersebut dipakai guna mendapat sumber informasi paling penting, karena didalamnya bisa dijumpai orientasi dari studi ini.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data pada studi ini memakai metode dari Creswell. Langkah pertama yaitu mengolah dan mempersiapkan data dengan menggunakan transkrip wawancara lalu memilahnya ke dalam jenis-jenis yang sama atau berbeda. Langkah kedua yaitu membaca keseluruhan data untuk mengetahui gagasan yang telah didapat dari partisipan. Prosedur ketiga yakni mengkaji lebih detail lewat mengcoding data dengan cara: mengambil data yang telah dikumpulkan, mensegmentasi kalimat di kategori, lalu melabeli golongan tersebut bersama istilah khusus misal istilah *in vivo*.

Analisa data ialah proses mengontrol urutan data, mengorganisasikan ke dalam sebuah pola, golongan serta satuan penjabaran dasar. Analisis data dilaksanakan disebuah proses yang bermakna penyelenggaraannya dimulai dilaksanakan semenjak

penghimpunan data serta digarap dengan intensif, yakni selepas meninggalkan lapangan. Proses analisa data dilaksanakan segera selepas peneliti meninggalkan lapangan. Menganalisis data bisa dilaksanakan semenjak peneliti ada dilapangan, namun sejumlah besar berkonsentrasi guna mengkaji data menginterpretasikan data itu ditahapan selepas melaksanakan studi lapangan.

Pada proses analisis data, ketiga bagian sesuai disebutkan hendak berkegiatan dengan interaktif lewat proses penghimpunan data. Data yang telah dihimpun berikutnya dianalisis berdasar dimensi *context*, *input*, *process*, serta *product* guna berikutnya dianalisis hubungannya antara dimensi satu bersama dimensi lainnya.

1.6.8 Kualitas Data

Keabsahan data yang didapat ketika melaksanakan penghimpunan data ialah kunci utama serta ialah faktor penentu dari suatu studi, sebab jika suatu data yang didapat diragukan kevalidannya maka studi itu jadi tak valid. Keabsahan data bisa didapat lewat proses penghimpunan data yang tepat. Satu diantara caranya ialah lewat proses triangulasi, yakni teknik guna mengecek kevalidan data guna penyelidikan ataupun pembanding pada data itu. Terdapat 4 jenis triangulasi selaku teknik pengecekan guna menggapai kevalidan, yakni : (Ahmadi, 2016:322)

a. **Triangulasi Data**

Yaitu dengan memakai sumber data misalnya berkas, arsip, capaian wawancara ataupun memakai wawancara lebih dari 1 subjek yang diasumsikan mempunyai sudut pandang yang berbeda.

b. **Triangulasi Pengamat**

Yaitu dengan terdapatnya pengamat luar selain peneliti yang turut mengecek pengumpulandata. Misalnya seperti dosen pembimbing yang bertindak selaku pengamat (*expert judgement*) dengan memberi saran pada capaian penghimpunan data.

c. Triangulasi Teori

Yaitu pemakaian beragam teori yang berlawanan guna memastikan data yang didapatkan telah memenuhi persyaratan.

d. Triangulasi Metode

Yaitu pemakaian beragam metode guna mengkaji sebuah perihal layaknya metode wawancara serta sebagainya.

Pada studi ilmiah ini untuk mendapatkan data yang valid penulis melaksanakan penelitian lapangan lewat cara menjalankan wawancara dengan subjek studi selaku pelaku sosial, lalu penulis melaksanakan analisa data yang terdapat hubungannya dengan studi ini, yakni mengenai anggaran responsif gender di Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018.